

## MENGGALI PERAN PENDAMING SOSIAL DALAM MENDORONG KEMANDIRIAN EKONOMI KPM PKH: STUDI KASUS DI KELURAHAN KEBON JAYANTI KOTA BANDUNG

<https://doi.org/10.31595/lindayasos.v6i2.1413>

### Bernadette Faustina<sup>1</sup>

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.  
[faustinaquinn@gmail.com](mailto:faustinaquinn@gmail.com)

### Ellya Susilowati

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia  
[ellya.susilowati@poltekesos.ac.id](mailto:ellya.susilowati@poltekesos.ac.id)

### Harapan Luban Gaol

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Indonesia  
[hargaol.poltekesos@gmail.com](mailto:hargaol.poltekesos@gmail.com)

### Journal History

Received: 27 November 2024  
Accepted: 31 December 2024  
Published: 2 January 2025

### ABSTRACT

*The Family Hope Program (PKH) aims to improve the welfare of poor families through cash assistance with certain conditions. However, the success of this program doesn't depend on the financial aid itself, but also on the role of social facilitator in empowering the beneficiary families to be economically independent. This study aims to obtain an overview of the role of social facilitator in building the economic independence of the beneficiary Family Hope Program in Kebon Jayanti Village which consists of facilitation, education, representation, and technical roles. This research uses a descriptive qualitative method. Data was collected using purposive sampling so that 13 informants were netted from the person in charge of PKH, Kebon Jayanti Village officials, PKH external parties, and the beneficiary family of PKH. The source of the data came from primary and secondary data with data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies. This research found that there are obstacles in the implementation of assistance, namely the absence of resource mapping and the lack of access of social facilitator to networks in Bandung City that can be utilized by KPM PKH in building economic independence.*

### KEYWORDS:

Role, Social Facilitator, Family Hope Program, Beneficiary Family, Economic Independence

### ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan tunai dengan syarat. Namun, keberhasilan program ini tidak bergantung pada bantuan finansial semata, tetapi juga pada peran pendamping sosial dalam memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat mandiri secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai peran pendamping sosial dalam membangun kemandirian ekonomi KPM PKH di Kelurahan Kebon Jayanti yang terdiri dari peran fasilitasi, edukasi, representasi, dan teknis. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive sampling sehingga terjaring tiga belas informan yang berasal dari penanggung jawab PKH, perangkat Kelurahan Kebon Jayanti, pihak eksternal PKH, dan KPM PKH. Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Dari Penelitian ini ditemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan pendampingan yaitu belum adanya pemetaan sumber daya dan kurangnya akses pendamping kepada jejaring di Kota Bandung yang dapat dimanfaatkan KPM PKH dalam membangun kemandirian ekonomi.

### KATA KUNCI:

Peran, Pendamping Sosial, Program Keluarga Harapan, KPM, Kemandirian Ekonomi

## PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu kondisi kompleks dimana sebagian masyarakat memiliki keterbatasan terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan peluang (Kusrina, T., 2022). Berbagai faktor penyebab terjadinya kemiskinan diantaranya yaitu adanya kesenjangan pendapatan, ketidaksetaraan ekonomi, dan kurangnya akses masyarakat miskin kepada pendidikan

Author correspondence email: [faustinaquinn@gmail.com](mailto:faustinaquinn@gmail.com)

Available online at: <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/lindayasos/index>

Copyright (c) 2024 by Lindayasos: Jurnal ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial



dan pekerjaan yang layak. Kemiskinan dan kemandirian ekonomi suatu masyarakat memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Sumitro (dalam Hasan, 2018) mendefinisikan kemandirian ekonomi sebagai keadaan di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tanpa bergantung pada bantuan pihak luar dan memiliki daya saing yang tinggi dalam usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu kemandirian ekonomi masyarakat mencerminkan kemampuan suatu kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri tanpa bergantung secara berlebihan pada sumber daya eksternal.

Di Indonesia, berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan berupa program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan lainnya. Melalui program yang ada tersebut, pemerintah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin dari 11,22% pada tahun 2014 menjadi 9,54% pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Salah satu instrumen kebijakan pemerintah tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah berjalan sejak tahun 2007. Program yang diselenggarakan dalam upaya mengatasi kemiskinan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga. PKH juga memberikan akses KPM kepada layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup. Seiring berjalannya waktu, keluarga miskin yang mendapat bantuan PKH harus dapat lepas dari bantuan agar tidak bergantung pada bantuan yang ada dan dapat mandiri secara ekonomi saat bantuan sudah tidak lagi didapatkan. Dalam hal ini, pendamping sosial memiliki peran penting untuk membantu KPM dalam perubahan perilaku dan mencapai kemandirian ekonominya.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa peran pendamping sosial berpengaruh dalam membantu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (Septiani, 2019). Meskipun, masih ada tantangan terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mengalami kesulitan untuk mencapai kemandirian karena berbagai hambatan sosial dan ekonomi yang mereka hadapi (Hartadi, 2024). Hal ini juga didukung oleh studi lainnya bahwa, tidak adanya peningkatan kesejahteraan KPM di suatu daerah terjadi karena kurangnya peran pendamping sosial dalam mendampingi KPM (Domri, 2019).

Dalam mendampingi KPM PKH, pendamping sosial memiliki peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi, dan motivasi bagi KPM PKH (Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, 2021). Hal ini sesuai dengan pendapat Jim Iffe (2018:558), yaitu pendamping di masyarakat memiliki peran fasilitasi, edukasi, representasi, dan teknis. Pendamping sosial di setiap daerah memiliki tugas untuk mendampingi KPM hingga dapat graduasi dan berdaya, termasuk pendamping sosial di Kelurahan Kebon Jayanti.

Jumlah KPM PKH di Kelurahan Kebon Jayanti Kecamatan Kiaracandong hingga trimester pertama tahun 2024 mencapai 350 KPM. Dari total 350 KPM PKH di Kelurahan Kebon Jayanti, sekitar 80 KPM memiliki usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Usaha yang dimiliki KPM PKH ini sebagian besar adalah usaha makanan yang dijual di sekitar rumah KPM. Kondisi ini seharusnya dapat mendukung dan mempercepat peningkatan graduasi dan kemandirian ekonomi KPM. Hal ini sejalan dengan salah satu indikator kemandirian ekonomi adalah dengan usaha dan percaya diri dalam menjalankan aktivitas bisnis (Prambodo dalam Safiudin, 2021). Namun, graduasi KPM PKH di Kelurahan Kebon Jayanti belum terlihat signifikan. Hal ini didukung oleh data di lapangan bahwa pendamping sosial di Kelurahan Kebon Jayanti memiliki target untuk dapat menggraduasi 2 KPM dalam satu bulan, namun target ini belum dapat tercapai.

Berdasarkan data rekap oleh pendamping sosial pada tahun 2024 trimester pertama, jumlah KPM di Kelurahan Kebon Jayanti berjumlah 350 KPM. Adapun berlandaskan dari aspek kemandirian ekonomi di Kelurahan Kebon Jayanti pada tahun 2023 hanya terdapat 2 (dua) KPM yang berhasil digraduasi karena telah berhasil mencapai kemandirian ekonominya dengan mengembangkan usahanya, sedangkan sebanyak 80 KPM yang juga memiliki usaha di Kelurahan Kebon Jayanti belum dapat mengembangkan usahanya dan terlepas dari bantuan PKH.

Berdasarkan pemaparan kondisi kemandirian ekonomi KPM PKH di Kelurahan Kebon Jayanti dan mengingat pentingnya peran pendamping sosial dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi KPM, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami bagaimana pendampingan kepada KPM PKH yang memiliki usaha mikro namun belum dapat

## **LITERATUR**

Pendamping sosial memainkan peran penting dalam mendorong KPM PKH untuk mencapai kemandirian ekonomi. Jim Iffe (2018) mengemukakan bahwa pendamping sosial berperan dalam membantu masyarakat menjadi lebih baik sehingga mereka dapat mengatur dan menentukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kehidupan usaha mereka. Ada empat peran utama yang harus dimiliki oleh seorang pendamping sosial, yaitu peran fasilitasi, peran edukasional, peran perwakilan, dan peran teknis. Setiap peran tersebut terdiri dari sub peran lainnya yang lebih spesifik. Peran fasilitasi merupakan peran yang berkaitan dengan stimulasi dan penunjang pengembangan masyarakat, terdiri dari pemberian semangat sosial, dukungan, mediasi dan negosiasi, dan membangun konsensus. Peran edukasional merupakan peran yang dilakukan pendamping sosial dalam memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada sasaran sehingga terjadi proses mengajar dan belajar dua arah. Peran ini terdiri dari peningkatan kesadaran, pemberian informasi, dan pelatihan. Adapun peran perwakilan adalah peran pendamping dalam berinteraksi dengan pihak luar demi kepentingan masyarakat sasaran, terdiri dari perolehan berbagai sumber daya, mengakses jaringan kerja, dan advokasi. Peran yang terakhir yaitu peran teknis adalah berbagai keterampilan teknis yang diperlukan untuk membantu proses pengembangan masyarakat, dalam hal ini keterampilan pendamping sosial dalam proses pengembangan KPM PKH. Peran ini terdiri dari pengumpulan dan analisis data, penggunaan teknologi, dan manajemen.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan tempat penelitian ditentukan menggunakan metode *purposive are*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sementara. Keabsahan data atau triangulasi yang digunakan yaitu dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu sehingga dapat menghasilkan validasi data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria informan yaitu orang yang menjadi sasaran maupun pihak internal dan eksternal PKH, memahami pelaksanaan PKH, dan berperan dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Kebon Jayanti. Berdasarkan kriteria tersebut, tersaring sejumlah 13 informan yang terdiri dari pihak internal PKH sejumlah 3 orang yaitu pendamping sosial, Koordinator PKH Kecamatan, dan Koordinator PKH Kota. Adapun untuk pihak eksternal PKH sejumlah 5 orang yaitu Kepala Sie Kesejahteraan Sosial Kelurahan, Pusat Kesejahteraan Sosial Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Selain itu, kebutuhan informasi juga dilengkapi 5 informan tambahan dari KPM PKH yang memiliki usaha mikro di Kelurahan Kebon Jayanti.

## DISKUSI DAN PEMBAHASAN

### Kondisi KPM PKH Kelurahan Kebon Jayanti

Program Keluarga Harapan masuk ke Kelurahan Kebon Jayanti pada tahun 2013. Sejak tahun 2013 hingga tahun 2024, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) didampingi oleh satu pendamping sosial yang sama, namun sempat dibantu oleh pendamping yang lain. Hingga saat ini, terdapat sebanyak 350 KPM di Kelurahan Kebon Jayanti. Dari total 350 KPM tersebut, sebanyak 80 KPM memiliki usaha mikro. Hal ini didukung oleh wilayah Kelurahan Kebon Jayanti yang merupakan pusat kegiatan sosial-ekonomi di Kecamatan Kiaracondong sehingga strategis untuk KPM membuka suatu usaha. Dalam melaksanakan pendampingan kepada KPM yang berjumlah 350 tersebut, pendamping sosial di Kelurahan Kebon Jayanti membagi KPM menjadi 13 kelompok. Dalam kelompok tersebut terdapat ketua kelompok yang bertugas untuk berkoordinasi dengan pendamping tersebut terkait dengan pelaksanaan PKH dimana setiap kelompok terdiri dari 20-35 KPM.

Setiap bulannya, pendamping sosial mendatangi kelompok-kelompok tersebut untuk mengadakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Pada kegiatan P2K2 tersebut, pendamping sosial juga melakukan pengecekan data KPM dan memberikan edukasi sesuai dengan modul yang ada. Modul yang disampaikan terkait dengan ekonomi, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, dan kesejahteraan sosial lansia juga disabilitas berat. Pada tahun 2024 ini, pendamping sosial di Kelurahan Kebon Jayanti berfokus pada modul ekonomi untuk disampaikan kepada KPM. Berbagai materi ekonomi yang disampaikan oleh pendamping sosial sesuai dengan modul yaitu terkait dengan mengelola keuangan keluarga, meminjam dan menabung, juga memulai usaha. Dengan fokus penyampaian pada modul ekonomi, diharapkan KPM dapat mengurangi permasalahan keuangan yang dihadapi mereka secara bertahap.

### Peran Fasilitasi Pendamping Sosial dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi

Dalam menjalankan peran fasilitasi, pendamping sosial mendorong kemandirian ekonomi KPM dengan membangun semangat, menyediakan dukungan, melakukan negosiasi, membangun konsensus, dan melakukan komunikasi personal kepada KPM. Terkait dengan membangun semangat KPM dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi, pendamping mendorong KPM untuk melanjutkan usaha dan mengembangkan usaha, juga menggerakkan KPM untuk mengelola keuangan keluarga. Hasil dari pemberian semangat oleh pendamping kepada KPM ini bervariasi. Dalam menjalankan usahanya, sebagian besar KPM yang memiliki usaha sudah memiliki semangat untuk tidak mudah menyerah dalam usahanya, namun masih ada KPM yang tidak dapat melanjutkan usaha memang karena terdapat masalah dalam finansialnya. Adapun dalam pengelolaan keuangan, meskipun pendamping sudah memberikan semangat untuk mengelola keuangannya dengan baik, tetap ada KPM yang tidak menjalankan pengelolaan keuangan tersebut. Hal ini karena KPM tidak selalu dipantau dalam pengelolaan usahanya sehingga kembali lagi kepada kebiasaan masing-masing KPM dalam menjalankan usaha.

Pendamping sosial juga memberikan dukungan dengan mengundang KPM yang sudah berhasil graduasi mandiri untuk membagikan pengalaman mengembangkan usaha. Hasil dari dukungan yang diberikan oleh pendamping melalui KPM yang sudah graduasi mandiri yaitu KPM yang masih mengembangkan usahanya mengetahui bagaimana proses pengembangan usaha dan faktor yang mempengaruhinya. KPM yang masih belajar mengembangkan usahanya ini menjadi terdorong untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi namun memang masih terkendaha dengan berbagai hal salah satunya dalam pemasaran penjualan produk.

Negosiasi juga dilakukan oleh pendamping sosial dalam menjalankan peran fasilitasi. Pendamping sosial melakukan negosiasi kepada pihak kewilayahan agar mereka dapat melibatkan KPM dalam program atau kegiatan pelatihan yang ada di kelurahan dan kecamatan. Pendamping sosial memiliki keterbatasan baik dalam keterampilan maupun dana sehingga diperlukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang dapat membantu KPM. Namun, hasil dari negosiasi ini belum optimal dimana meskipun pendamping sosial melakukan negosiasi, baik kelurahan maupun kecamatan belum memiliki program pelatihan pemberdayaan yang dapat diikuti oleh KPM untuk meningkatkan kemampuannya dalam berwirausaha.

Selain negosiasi, pendamping sosial juga membangun konsensus atau kesepakatan dengan KPM. Kesepakatan yang dibangun oleh pendamping sosial adalah kesepakatan agar KPM mau untuk digraduasi apabila sudah memiliki perekonomian yang lebih baik. Lebih baik disini memiliki artian bahwa KPM dapat memenuhi kebutuhan primer atau sehari-harinya tanpa

memanfaatkan bantuan PKH. Hasil dari kesepakatan yang dibangun ini yaitu KPM yang memang sudah meningkat ekonominya tidak menolak saat diajukan untuk graduasi mandiri, namun memang jumlah KPM yang meningkat ekonominya ini kecil yaitu sekitar 5 KPM yang sedang diarahkan untuk graduasi mandiri.

Terakhir, dalam peran fasilitasi ini pendamping sosial juga melakukan komunikasi personal. Komunikasi personal yang dilakukan oleh pendamping yaitu dengan *home visit*, berdialog dalam kelompok kecil, dan berkomunikasi melalui media online. Komunikasi ini dilakukan oleh pendamping sosial untuk lebih mengenal baik karakter maupun kondisi KPM yang didampinginya. Namun, pelaksanaan *home visit* ini tidak dilakukan secara intensif karena banyaknya dampingan yang dimiliki yaitu sebanyak 350 KPM. Sehingga, pendamping sosial tidak dapat terus menerus melakukan *home visit* kepada semua KPM secara rata dalam upaya membangun kemandirian ekonomi KPM tersebut.

#### **Peran Edukasi Pendamping Sosial dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi**

Penyebab KPM PKH sulit melepaskan diri dari bantuan PKH adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh KPM tersebut dalam memperoleh peluang ekonomi. Dalam hal ini, edukasi merupakan hal yang perlu diberikan kepada KPM PKH untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka. Pendamping sosial melakukan peran edukasi melalui peningkatan kesadaran, pemberian informasi, dan pelatihan. Pendamping sosial meningkatkan kesadaran KPM dengan memberikan pemahaman bahwa bantuan PKH yang diterima memiliki waktu dan jumlah yang terbatas yaitu masa kepesertaan selama 5 tahun dan jumlah bantuan yang disesuaikan pada komponen yang dimiliki KPM. Pendamping sosial juga memberikan pemahaman kepada KPM untuk memiliki sumber penghasilan lain yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu sumber penghasilan yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan sebagian bantuan yang diberikan menjadi modal usaha agar dapat diputar kembali menjadi penghasilan KPM.

Selain peningkatan kesadaran, pendamping sosial juga memberikan informasi-informasi yang dapat membantu KPM membangun kemandirian ekonomi. Informasi yang diberikan terkait dengan modul ekonomi dan program pelatihan usaha. Modul ekonomi disampaikan melalui sosialisasi dalam kelompok-kelompok kecil KPM yang dalam satu kelompok terdiri dari 25-30 KPM atau yang disebut sebagai Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Peran edukasi terakhir yang dilakukan pendamping sosial adalah mengadakan pelatihan. Pelatihan yang diberikan yakni melatih KPM untuk melakukan pengelolaan keuangan. Pelatihan ini diberikan oleh pendamping sosial saat mengadakan pertemuan P2K2 yang membahas mengenai modul Mengelola Keuangan Keluarga. Pelatihan ini diberikan dalam satu kali sesi P2K2 dimana KPM juga diberikan tugas untuk mencatat pengelolaan keuangan dalam sebulan untuk kemudian diperiksa oleh pendamping sosial. Namun, pelatihan yang diberikan pendamping kepada KPM masih kurang. Pelatihan pengelolaan keuangan yang hanya diberikan sekali oleh pendamping ini tidak dilakukan oleh semua KPM dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini disebabkan oleh kurang pemahamannya KPM dalam menyusun pencatatan pengelolaan keuangan tersebut dan didukung oleh kebiasaan KPM yang memakai uang yang ada untuk dipakai sehari-hari tanpa mencatatnya.

Selain sebagai pelatih, pendamping sosial juga membantu KPM dalam memperoleh pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini tidak dapat diberikan oleh pendamping sosial itu sendiri karena memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang mendalam terkait dengan kewirausahaan. Namun, program pelatihan yang tersedia dan dapat diikuti oleh KPM di Kelurahan Kebon Jayanti masih sangat terbatas yaitu hanya PENA dan Program Fasilitasi Pengembangan Bantuan Ekonomi Masyarakat yang diadakan oleh Dinas Sosial.

#### **Peran Representasi Pendamping Sosial dalam Mendorong Kemandirian EKonomi**

Dalam upaya membangun kemandirian ekonomi KPM, pendamping sosial sebagai individu tidak dapat melakukannya sendiri, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama pihak yang memiliki keahlian dalam pengembangan ekonomi untuk membantu pendamping sosial dalam membangun kemandirian KPM tersebut. Dengan mewakili kepentingan KPM PKH kepada sistem sumber yang lebih luas, pendamping sosial dapat membantu KPM PKH untuk memperoleh pendampingan dan pengembangan kemampuan juga peluang yang lebih baik dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi. Pendamping sosial menjalankan peran representasi dengan memperoleh sumber daya, mengakses jaringan kerja, dan melakukan advokasi. Dalam memperoleh sumber daya, pendamping sosial membantu KPM mengakses pelatihan usaha yang diperlukan. Pelatihan yang tersedia saat ini untuk KPM PKH adalah PENA dan Program Fasilitasi Pengembangan Bantuan Ekonomi Masyarakat. Berdasarkan syarat dan ketentuan penerima bantuan tersebut, tidak semua KPM PKH yang memiliki usaha dapat menerimanya. Untuk program PENA, KPM yang diarahkan pendamping sosial untuk mengakses program ini adalah KPM yang berusia 20-40 tahun, sehingga KPM yang berusia 40-50 tahun tidak diarahkan untuk mendapatkan bantuan ini. Program pelatihan lain yang tersedia adalah Program Fasilitasi Pengembangan Bantuan Ekonomi Masyarakat. Program ini berasal dari Dinas Sosial yang ditujukan bagi KPM PKH yang terdaftar sebagai Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE). Hingga saat penelitian ini berlangsung, pelaksanaan program ini baru sampai di tahap pendataan kepada KPM yang terdaftar sebagai PRSE tersebut.

Pendamping sosial juga membantu KPM dalam mendapatkan bantuan modal. Hingga saat ini, KPM mendapatkan bantuan modal usaha apabila mengikuti PENA dimana di dalam PENA tersebut, KPM harus terlebih dahulu setuju untuk graduasi mandiri dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Setelah mengikuti pelatihan, KPM akan mendapatkan bantuan modal untuk usahanya. Untuk KPM yang mengikuti PENA Berdikari akan mendapat bantuan sejumlah 2.400.000 rupiah dan untuk KPM yang mengikuti PENA Reguler akan mendapat bantuan sejumlah 5.000.000 rupiah. Bantuan modal yang didapat tersebut dimanfaatkan oleh KPM untuk membeli peralatan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha dan juga sisanya dapat diterima dalam bentuk tunai untuk dimanfaatkan sebagai modal mengembangkan usaha.

Mengakses jaringan kerja juga merupakan peran yang dilakukan pendamping sosial dalam mendorong kemandirian ekonomi KPM. Pendamping sosial di Kelurahan Kebon Jayanti berkerjasama dan berkolaborasi dengan pendamping sosial di kelurahan dan kecamatan lainnya dalam melakukan pendampingan. Kerja sama dan kolaborasi dilakukan dalam hal membagikan informasi, mengakses program, dan melakukan edukasi kepada KPM dalam upaya membangun kemandirian ekonomi. Selain antar pendamping sosial, hubungan juga dijalin dengan pihak kewilayahan. Pihak kewilayahan dalam hal ini adalah kelurahan dan kecamatan. Pihak kelurahan yang membantu pendamping sosial dalam pelaksanaan tugasnya adalah RT/RW, Puskesmas, dan Kepala Sie Kesejahteraan Sosial dalam melakukan verifikasi dan validasi data KPM. Adapun dengan pihak kecamatan, pendamping berkoordinasi apabila ada program kewirausahaan yang dapat diikuti oleh KPM.

Selain pihak kewilayahan tersebut, pendamping sosial juga berjejaring dengan dinas di Kota Bandung. Dinas Sosial mengarahkan pendamping untuk selalu melakukan pendampingan kepada KPM secara rutin dan memberikan motivasi agar mereka dapat keluar dari kepesertaan secara mandiri. Namun, untuk membantu KPM yang sudah memiliki embrio usaha, pendamping sosial belum melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Pendamping sosial juga belum memiliki jaringan dengan mitra kerja dari organisasi non pemerintah atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kota Bandung.

Terakhir, pendamping sosial dalam peran representasi juga melakukan advokasi. Advokasi dilakukan sebagai upaya mendorong pihak luar untuk mau membantu KPM dalam membangun kemandirian ekonominya. Dalam hal ini, pendamping sosial mengkomunikasikan kebutuhan KPM kepada Direktorat Pemberdayaan Sosial dan Balai Pendidikan dan pelatihan milik Kementerian Sosial untuk diikutkan kepada program PENA. Selain kepada lembaga tersebut, pendamping sosial juga mendorong pihak kelurahan dan kecamatan untuk melibatkan KPM PKH dalam program bantuan atau pelatihan yang ada di kelurahan ataupun kecamatan. Namun, kelurahan dan kecamatan saat ini belum memiliki program yang dapat mendukung pendamping sosial dalam mendorong kemandirian ekonomi KPM.

#### **Peran Teknis Pendamping Sosial dalam Membangun Kemandirian Ekonomi**

Peran teknis merupakan peran pendamping sosial dalam melakukan tugasnya yang berkaitan dengan pendampingan kepada KPM. Hal ini merujuk pada keahlian dan tanggung jawab teknis yang diemban oleh pendamping sosial untuk meningkatkan efektivitas dan memperkuat ketercapaian tujuan KPM dalam membangun kemandirian ekonomi. Peran teknis yang dilakukan oleh pendamping sosial yaitu pengumpulan dan analisis data, memanfaatkan teknologi, dan keterampilan manajemen.

Pendamping sosial melakukan pengumpulan dan analisis data KPM untuk mempermudah dalam melakukan pemetaan kepada KPM PKH yang dapat didorong kemandirian ekonominya. Adapun data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh pendamping sosial adalah data penghasilan KPM dan data KPM yang memiliki usaha. Dengan memiliki data tersebut, pendamping sosial lebih mudah dalam melakukan pendekatan kepada KPM yang bisa diarahkan kepada program bantuan dan pelatihan usaha dalam upaya membangun kemandirian ekonomi.

Dalam pemanfaatan teknologi, pendamping sosial menggunakan media sosial sehingga dapat lebih mudah dan efektif untuk berkomunikasi dengan kelompok KPM baik dalam mendiskusikan pertemuan, membuat janji temu, maupun menyebarkan informasi yang berguna bagi KPM. Selain untuk berkomunikasi, pendamping sosial juga memperkenalkan kepada KPM bahwa media sosial dapat dimanfaatkan oleh KPM untuk mempromosikan produk usaha yang dimiliki. Media sosial yang paling banyak dimanfaatkan oleh KPM adalah WhatsApp karena KPM memiliki keterbatasan keterampilan dan peralatan yang mendukung untuk bisa mengakses *e-commerce* yang saat ini sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Peran teknis yang berikutnya adalah keterampilan manajemen. Berdasarkan hasil di lapangan, pendamping sosial belum melakukan manajemen dengan baik dalam mendorong KPM pada kemandirian ekonomi. Manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Terry (2006) menyatakan bahwa pemetaan sumber daya merupakan langkah penting dalam proses perencanaan dan pengorganisasian yang efektif. Dalam perencanaan, pendamping sosial seharusnya mengidentifikasi sumber daya yang tersedia dan bagaimana sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam pengorganisasian, seharusnya pendamping sosial menempatkan sumber daya yang tersedia tersebut sesuai dengan kompetensinya dan melaksanakan koordinasi juga komunikasi dengan sumber daya tersebut untuk memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Namun, pendamping sosial di Kelurahan Kebon Jayanti belum melaksanakan pemetaan sumber daya yang baik dalam pelaksanaan manajemennya. Hasil dari peran teknis pendamping sosial yang belum optimal ini yaitu KPM PKH tidak terpantau perkembangan usahanya dan belum adanya pemetaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh KPM dalam membangun kemandirian ekonominya.

Hasil penelitian mengenai peran pendamping sosial dalam mendorong kemandirian ekonomi KPM di Kelurahan Kebon Jayanti, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, menunjukkan adanya empat peran pendamping sosial. Dalam peran fasilitasi, pendamping sosial sudah melakukan membangun semangat, menyediakan dukungan, melakukan negosiasi, membangun konsensus, dan melakukan komunikasi personal kepada KPM. Namun, negosiasi yang dilakukan oleh pendamping sosial belum berhasil mendorong KPM mencapai kemandirian ekonominya karena tidak tersedianya program pelatihan pemberdayaan oleh pihak kelurahan maupun kecamatan. Komunikasi personal yang dibangun antara pendamping sosial dengan KPM juga tidak dilakukan secara intensif karena banyaknya jumlah KPM yang ada di Kelurahan Kebon Jayanti tidak sebanding dengan pendamping sosial yang ada. Sementara dalam peran edukasi, pelatihan yang diberikan pendamping kepada KPM masih kurang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan KPM dalam mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonominya. Pentingnya peran pendamping dalam fasilitasi seperti dikemukakan oleh (Yvanka, 2023; , Habibullah, 2011)

Dalam peran representasi, sumber daya yang dapat diakses oleh KPM untuk mengembangkan usahanya masih terbatas dan memiliki kriteria khusus sehingga tidak dapat diikuti oleh sebagian besar KPM. Akses jaringan kerja antara pendamping sosial dengan dinas-dinas DI Kota Bandung yang dapat membantu KPM memperbaiki kondisi ekonominya juga masih terbatas. Hal ini didukung oleh tidak adanya kerja sama antara PKH di Kelurahan Kebon Jayanti dengan Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kota Bandung yang dapat membantu mengadakan program bantuan ataupun pelatihan kewirausahaan untuk mendorong kemandirian ekonomi KPM PKH. Adapun dalam peran teknis, pendamping sosial belum melaksanakan manajemen dengan baik yaitu pada pembaruan pendataan KPM dan pemetaan sumber daya yang tersedia sehingga perkembangan usaha KPM tidak terpantau.

**Analisis masalah** peran pendamping sosial dalam mendorong kemandirian ekonomi KPM PKH di Kelurahan Kebon Jayanti ini saling terhubung dan melibatkan berbagai aspek terutama berkaitan dengan pelaksanaan peran representasi dimana pendamping kurang dapat mengakses sumber daya dan jaringan kerja yang diperlukan KPM PKH dalam membangun kemandirian ekonomi. Hal ini menjadi kendala bagi KPM karena mereka tidak cukup kuat untuk dapat memandirikan ekonominya sendiri sehingga diperlukan bantuan dari luar untuk membantu KPM meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam berwirausaha. Banyak dari mereka belum pernah mendapatkan bantuan modal dan pelatihan usaha yang seharusnya menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan ekonomi mereka. Hal ini menjadi penghambat KPM dalam mengembangkan usahanya dan membangun kemandirian ekonomi. Pendamping sosial maupun Koordinator PKH belum memiliki jaringan kerja yang terkoordinasi baik dengan pemerintah daerah, NGO, dan CSR di Kota Bandung. Keterbatasan dalam jaringan ini menghambat akses KPM PKH terhadap informasi, peluang, dan sumber daya yang dapat meningkatkan potensi ekonomi mereka. Tanpa koneksi yang memadai, pendampingan sosial yang efektif dalam menghubungkan KPM dengan program pelatihan, bantuan modal, atau peluang kerja sama dengan pihak eksternal yang dapat membantu KPM menjadi sulit dilakukan.

**Analisis kebutuhan** dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan peran pendamping sosial dalam mendorong kemandirian ekonomi KPM PKH di Kelurahan Kebon Jayanti. Dua aspek utama yang dianalisis untuk kebutuhan ini adalah peningkatan kapasitas pendamping sosial dan penanggung jawab PKH dalam pengembangan jaringan kemitraan dengan pihak eksternal. Jaringan dan kemitraan dengan pelaku usaha lokal, lembaga keuangan, serta berbagai pihak terkait, menjadi fondasi penting dalam memperluas akses KPM terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Pembentukan forum diskusi dengan berbagai pihak eksternal baik pemerintah maupun non pemerintah juga diperlukan. Forum semacam ini menjadi sarana efektif untuk mendiskusikan tantangan, peluang, dan solusi terkait dengan pembangunan ekonomi KPM PKH. Melalui forum ini, pendamping sosial dan penanggung jawab PKH dapat menggalang dukungan dan kerjasama dari berbagai sektor untuk mendukung inisiatif kewirausahaan dan pengembangan usaha KPM PKH. Dengan membangun kemitraan yang kuat, KPM PKH akan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya, informasi pasar, teknologi, dan modal yang mendukung pertumbuhan usaha mereka. Dengan demikian, pembentukan forum diskusi bukan hanya tentang bertukar informasi, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk mendukung kemandirian ekonomi KPM PKH dalam jangka panjang.

#### **Analisa Sistem Sumber**

##### **1. Sistem Sumber Informal**

Sistem sumber informal dalam hal ini adalah kelompok pendamping sosial Kota Bandung dan kelompok KPM PKH Kelurahan Kebon Jayanti. Pendamping sosial baik antar kelurahan maupun antar kecamatan memiliki ikatan untuk saling membantu, mendukung, dan berbagi informasi dalam mendampingi KPM. Kelompok KPM PKH sendiri merupakan kelompok yang dibentuk agar KPM dapat saling mendukung dan berbagi informasi dalam kepesertaannya di PKH.

##### **2. Sistem Sumber Formal**

Sistem sumber formal dalam hal ini adalah Dinas Sosial yang bertugas menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH.

##### **3. Sistem Sumber Kemasyarakatan**

Sistem sumber kemasyarakatan dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Forum CSR Bandung.

KPM dan pendamping dapat memperkuat jaringan dukungan yang diperlukan untuk mencapai graduasi (Indrasawarni, 2023).

#### **Usulan Program**

Untuk memaksimalkan peran pendamping dalam mendorong kemandirian ekonomi KPM PKH di Kelurahan Kebon Jayanti, diperlukan suatu sinergi dan kolaborasi antara penanggung jawab PKH, baik itu pendamping, koordinator, maupun Dinas Sosial sendiri dengan pihak eksternal di Kota Bandung. Dalam usulan program ini, penulis mengusulkan adanya sinergi baik dari pihak internal maupun eksternal PKH di Kota Bandung, khususnya Kelurahan Kebon Jayanti dan Kecamatan Kiarascondong dalam hal pembangunan kemandirian ekonomi KPM PKH agar terbangun jaringan yang kuat melalui program "Sinergi Kreatif Mendorong Kemandirian Ekonomi KPM PKH".

**Tujuan umum** yang hendak dicapai dalam program ini adalah mengoptimalkan sinergitas antara pendamping sosial dan penanggung jawab PKH dengan *stakeholder* dalam membangun kemandirian ekonomi KPM PKH di Kelurahan Kebon Jayanti.

**Tujuan khusus** dari program ini yaitu memperluas jaringan kerja pendamping sosial dengan pihak pemerintah maupun swasta dan menciptakan koordinasi yang efektif dan efisien antara pendamping sosial dan penanggung jawab PKH dengan *stakeholder* yang dapat membantu membangun kemandirian ekonomi KPM.

**Metode** yang diterapkan dalam program ini adalah *Community Organization and Community Development (COCD)* atau pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Metode ini dimanfaatkan untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak terkait yang dapat mendukung pendamping PKH dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi KPM PKH. Selain itu, metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman lembaga pemerintah dan swasta tentang kebutuhan KPM PKH dalam hal kemandirian ekonomi. Implementasi metode COCD dilakukan melalui berbagai strategi dan taktik, termasuk strategi kolaborasi dan kampanye. Strategi kolaborasi dalam konteks ini merujuk pada upaya membangun hubungan kerjasama antara sistem-sistem perubahan. Strategi Kolaborasi ini dijalankan melalui pembentukan forum diskusi dan koordinasi sebagai taktik implementasinya. Adapun strategi kampanye, dalam konteks ini, mengacu pada kegiatan yang bertujuan meyakinkan pihak eksternal PKH mengenai kebutuhan KPM PKH dalam program pemberdayaan usaha mereka.

**Rencana kegiatan** yang akan dilakukan mencakup kegiatan *Workshop* pendamping sosial dengan *stakeholder* internal maupun eksternal PKH Kota Bandung dan Pembentukan Forum antara pendamping sosial dengan *Stakeholder* internal maupun eksternal PKH Kota Bandung. *Workshop* ditujukan untuk mendiskusikan kebutuhan dan tantangan yang dialami pendamping sosial dalam mengakses berbagai jejaring di Kota Bandung untuk mendapatkan pelatihan dan bantuan modal untuk pengembangan usaha KPM. Dalam kegiatan ini akan disampaikan juga terkait perlunya kolaborasi antara pendamping sosial dengan para *stakeholders* dalam membantu KPM mengakses berbagai sumber daya yang diperlukan dalam membangun kemandirian ekonominya. Hal ini perlu disampaikan agar antara pendamping sosial dan *stakeholders* yang terlibat memiliki kesamaan tujuan dalam bermitra atau berjejaring. Adapun pembentukan forum dilakukan untuk mengembangkan strategi bersama dalam mendukung upaya membangun kemandirian ekonomi KPM PKH. Dalam kegiatan ini, juga akan dibicarakan mengenai bagaimana struktur kepengurusan forum akan diatur dan penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga forum. Selain itu, akan dibahas pula mengenai rencana kerja ke depan dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan KPM melalui wirausaha, serta jadwal dan detail dari kegiatan monitoring dan evaluasi yang diadakan secara rutin.

#### **Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan bertujuan memberikan pengukuran tingkat keberhasilan program terhadap tujuan program secara objektif. Berikut indikator yang mengindikasikan keberhasilan pada program “Sinergi Kreatif Mendorong Kemandirian Ekonomi KPM PKH”:

1. Terbentuk forum kerjasama antara pendamping sosial dengan *stakeholders* internal dan eksternal dalam membangun kemandirian ekonomi KPM PKH
2. Terbentuk program pemberdayaan di Kota Bandung untuk mendorong kemandirian ekonomi KPM PKH
3. Terjadi peningkatan keterampilan wirausaha dan penghasilan KPM PKH

## **KESIMPULAN**

Pada penelitian ini, peneliti berhasil mengungkapkan peran pendamping sosial dalam mendorong kemandirian ekonomi pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kebon Jayanti. Ditemukan bahwa untuk mendorong kemandirian ekonomi secara optimal dan mencapai graduasi mandiri, pendamping sosial tidak dapat hanya melakukan pendampingan tersebut sendiri. Terdapat pengetahuan maupun keterampilan yang tidak dimiliki pendamping sosial sepenuhnya dalam kaitannya dengan kemandirian ekonomi. Namun, kerja sama dan sinergi yang dimiliki baik oleh pendamping sosial, penanggung jawab PKH Kota Bandung, dan sumber daya eksternal yang tersedia belum terbentuk secara kuat sehingga upaya peningkatan kemandirian ekonomi KPM PKH belum maksimal. Untuk itu, peneliti merekomendasikan beberapa hal terkait upaya mendorong kemandirian ekonomi KPM PKH dengan usulan program “Sinergi Kreatif Mendorong Kemandirian Ekonomi KPM PKH”. Meski demikian, penelitian ini masih memiliki peluang untuk pengembangan lebih lanjut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. 2023-2024. Statistik Indonesia, BPS Jakarta Indonesia, Indonesia.
- Domri., Ridwan., Jaya, M. (2019). Efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah ISSN*, 1(1), 1–16.
- Habibullah, H. (2011). Peran pendamping pada program keluarga harapan di kabupaten karawang. *Sosio Informa*, 16(2). <https://doi.org/10.33007/inf.v16i2.956>
- Hartadi, M. I., Arif, A., & Poerwanti, S. D. (2024). Uncovering Barriers To Spectrum: Family Hope Programme (PKH) in Beneficiary Families (KPM). *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 6(1), 1-9.
- Hasan, M. (2018). Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat: strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal. Makassar: CV. Nur Lina; Makassar: Pustaka Taman Ilmu.
- Ife, J., Tesoriero, F. (2018). *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

- Indrasawarni, N. (2023). Modal sosial dalam graduasi sejahtera mandiri program keluarga harapan di provinsi bali. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 10(1), 35. <https://doi.org/10.22146/jps.v10i1.81752>
- Yvanka, V. (2023). Analisis komparasi pemberdayaan masyarakat dalam implementasi program keluarga harapan di kota padang. *Jipags (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 7(2). <https://doi.org/10.31506/jipags.v7i2.20623>
- Kusrina, T. (2022). Kemandirian masyarakat miskin. 34–50.
- Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021-2024. 2021. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Safiudin, A. (2021). Membentuk kemandirian ekonomi pesantren (Telaah terhadap peran kiai dalam pesantren Al-Amien Prenduan, Madura). *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(2).
- Septiani, D., Nurmalisa, Y., & Halim, A. (2019). Peran pendamping program keluarga harapan dalam membantu kemandirian dan kesejahteraan keluarga. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5(1).
- Terry, G. R. (2006). *Principles of Management* (9th ed.). New York: Harper & Row.